

# STRATEGI DAN PARTISIPASI PENGEMBANGAN KAMPUNG ADAT SEGUNUNG

(Studi Kasus Ds. Carangwulung Kec. Wonosalan Kab. Jombang)

Ria Kusumastuty<sup>1</sup>, Dian Wijaya<sup>2</sup>, Rachman Sidharta Arisandi

Universitas Islam Majapahit, Mojokerto

**Abstraksi** : Konsep pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan penekanan pada upaya pemberdayaan desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Selain itu, dijelaskan tentang program inovasi desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya Bursa Inovasi Desa (BID) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa melalui pengembangan potensi lokal. Kemudian, disampaikan tentang strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan objek dan daerah tujuan wisata (ODTW).

**Kata Kunci** : Desa, Masyarakat Setempat, Pemerintahan Desa, Potensi Desa

## 1. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*UU Nomor 6 Tentang Desa*, 2014).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 secara khusus mengatur desa dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan memberikan semangat dan kewenangan yang besar kepada desa untuk mengembangkan potensi yang ada serta mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Undang-Undang ini juga mengkonstruksi kewenangan desa dalam Pasal 18 yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (*UU Nomor 6 Tentang Desa*, 2014).

Salah satu strategi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini adalah dengan memprioritaskan penggunaan dana dari desa sebagai perkembangan potensi bagi ekonomi lokal berdasarkan dari kondisi serta potensi yang telah ada guna mencapai tujuan tahunan RPJM Desa dan RKP desa (Arimayanti, 2017).

Selain itu, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 menjelaskan bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2 bersumber dari (a) pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; (f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (g) lain-lain pendapatan desa yang sah (*UU Nomor 6 Tentang Desa*, 2014). Menurut peraturan ini dapat diartikan bahwa salah satu pendapatan asli dari desa adalah yang dapat diperoleh dari harta kekayaan yang dimiliki oleh desa atau bisa disebut dengan aset desa. Aset desa disini bisa seperti keindahan alam dan lainnya. Penjelasan tersebut dapat membawa kita pada kesimpulan bahwa pemerintah dapat memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mengembangkan dan membangun desa.

Pada bulan oktober tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang membuat dan meresmikan sebuah program baru untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan desa pada penyusunan perencanaan pembangunan dan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi desa. Pada Program Inovasi Desa (PID), didalamnya terdapat Bursa Inovasi Desa (BID) yang dimana program ini merupakan salah satu wadah untuk pertukaran sebuah ide-ide dari keseluruhan desa yang berada di Kabupaten Jombang.

- **Ria Kusumastuty**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [riak@gmail.com](mailto:riak@gmail.com)
- **Dian Wijaya**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [dianwijayasip@gmail.com](mailto:dianwijayasip@gmail.com)
- **Rachman Sidharta Arisandi**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto

Adanya Bursa Inovasi Desa ini bertujuan untuk melihat berbagai kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Disana setiap desa memiliki kesempatan untuk mencontoh dan menerapkan ide-ide tersebut pada masing-masing desanya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Bursa Inovasi Desa (BID) ini terangkum dalam tiga bidang dengan 3 tahapan yang diantaranya adalah mengembangkan ekonomi lokal dan kewirausahaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur desa. Tujuan dari adanya Bursa Inovasi Desa ini adalah untuk memunculkan produk unggulan dari masing-masing desa, sehingga desa dapat mengoptimalkan potensi-potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didesa. Selain itu agar masyarakat desa lebih memiliki semangat dan berantusias dalam mengembangkan potensi desa dan lebih bisa produktif, kreatif, dan inovatif untuk mengangkat potensi yang berada di desa yang meliputi keragaman hasil alam, keindahan alam, dan pembuatan produk-produk asli desa seperti wisata desa, olahan dari hasil panen, dan lain-lain (Rakhmawati, 2018).

Menurut penelitian Ryando P dan Asrida dalam jurnal (Permana & Asrida, 2011) menunjukkan bahwa pengembangan sebuah wisata akan dikatakan berhasil jika melibatkan masyarakat lokal didalamnya atau juga bisa disebut pengembangan wisata berbasis masyarakat. Keberadaan Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) sangat perlu diperhatikan, karena keberadaannya yang menjadi daya tarik yang menjadikan wisatawan. Jika ada potensi dan daya tarik untuk menjadikan ODTW unik dan spesifik yang tidak akan ditemukan di ODTW lain, maka ODTW akan menarik bagi wisatawan. Pengembangan ODTW, terutama yang berskala kecil, sangat bergantung pada kontribusi masyarakat setempat (Harobu, 2020). Dalam pengembangan objek dan potensi wisata pada desa yang layak membutuhkan strategi pemerintah desa dan kontribusi masyarakatnya. Dalam strategi disini pemerintah desa dapat membuat kebijakan dan mempengaruhi masyarakat agar bisa ikut serta dalam mengembangkan wisata di daerah atau desanya, dan menjalankan program-program yang telah dibuat sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa sebuah wisata akan berjalan dan berkembang jika dilakukan dan dikelola secara berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah serta yang lainnya.

Karena itu setelah mengikuti pembukaan Program Inovasi Desa oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang pada tahun 2018, Pemerintah Desa Carangwulung beserta masyarakat mulai berencana untuk membuat sebuah produk yang bisa diunggulkan baik produk yang dimiliki oleh perorangan maupun yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Desa Carangwulung adalah salah satu desa yang berada di wilayah wonosalam yang terkenal dengan hawa sejuk karena berada dilereng Gunung Anjasmoro dan merupakan daerah penghasil durian terbanyak di Jawa Timur. Melihat dari potensi di Desa Carangwulung sendiri adalah keindahan alam dan hasil alamnya, maka dari itu pemerintah desa berencanakan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang sudah ada, dengan mengajak kerjasama seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Desa Carangwulung juga terhitung pada

tahun 2020 sudah memiliki beberapa tempat wisata yang cukup banyak pengunjung setiap harinya dan terus dalam proses menambahkan dan perbaikan.

**Tabel 1.1 Data Wisata Desa Carangwulung  
Tahun 2020**

No	Nama
1.	Dalem Si Mbah
2.	Kampung Adat Segunung
3.	Kampoeng Djawi
4.	Banyu Mili
5.	Bukit Pinus
6.	Banyu Grojogan
7.	De Durian Park

Sumber: Data Peneliti 2021

Berkaitan hal tersebut penulis memfokuskan penelitian ini di wisata Kampung Adat Segunung yang dimana merupakan wisata yang bentuk produk wisatanya melibatkan masyarakat setempat. Wisata Kampung Adat Segunung terbilang cukup baru dan masih membutuhkan banyak pengembangan baik dari pemerintah desa maupun masyarakatnya. Karena itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian yakni “Strategi Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Kampung Adat Segunung”.

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengembangkan wisata Kampung Adat Segunung?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat Dusun Segunung dalam pengembangan wisata Kampung Adat Segunung?

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Strategi apa saja yang digunakan oleh pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Adat Segunung.
2. Untuk mengetahui partisipasi apa saja yang dilakukan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi di wisata Kampung Adat Segunung.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  1. Sebagai bahan informasi untuk Pemerintahan Kabupaten Jombang khususnya Pemerintah Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam dalam strategi pengembangan wisata Kampung Adat Segunung
  2. Sebagai menambah pengetahuan dan wawasan tentang strategi Pemerintah Desa Kecamatan Wonoalam dalam mengembangkan potensi yang ada di desa
  3. Bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya jika peneliti meneliti tema yang sama.
2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan Kabupaten Jombang khususnya Pemerintah Desa Carabgwulung, diharapkan bisa selalu memberikan pengembangan untuk meningkatkan strategi pengembangan potensi-potensi yang ada di desa.
2. Bagi Masyarakat, agar mendapatkan kepuasan dan memiliki motivasi untuk bisa mencapai kesejahteraan terutama pada bidang ekonomi.
3. Bagi Penulis, untuk bisa mengetahui deskripsi tentang Strategi Pemerintah Desa Dan Kontribusi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Kampung Adat Segunung.

## 2. LANDASAN TEORI

### 1 Good Governance

*Good governance* adalah kesepakatan tentang pengaturan negara yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Perjanjian tersebut mencakup pembentukan berbagai mekanisme, prosedur, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat menyatakan kepentingannya, melaksanakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan antara mereka. Dalam sebuah pemerintahan yang baik, harus menerapkan beberapa prinsip seperti (1) Profesionalitas, yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan tepat dengan biaya yang terjangkau, (2) Akuntabilitas, yang dimaksud adalah untuk meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan di semua bidang yang menyangkut kepentingan umum, (3) Transparansi, yang dimaksud adalah dengan memberikan informasi dan memastikan kemudahan akses informasi yang akurat dan tepat, membangun rasa saling percaya baik antara pemerintah maupun masyarakat, (4) Pelayanan prima, yang dimaksud adalah terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu tinggi, meliputi prosedur yang baik, tarif yang jelas, waktu yang pasti, akses yang mudah, sarana dan prasarana yang lengkap, serta pelayanan yang ramah dan disiplin, (5) Demokrasi dan Partisipasi, yang dimaksud adalah setiap warga didorong untuk menggunakan hak berpendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepentingan masyarakat, (6) Efisiensi dan Efektifitas, merupakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang terbaik dan bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya layanan kepada masyarakat, (7) Supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat, yang dimaksud adalah mewujudkan penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa terkecuali, menjaga Hak Asasi Manusia dan memperhatikan nilai kehidupan sosial. menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Tomuka, 2012).

Sedangkan menurut *United Nations Development Program* (UNDP), *governance* adalah pelaksanaan kekuasaan atau wewenang dalam pengelolaan urusan nasional di semua tingkatan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi, yang merupakan alat kebijakan nasional untuk mendorong kreativitas. Kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohendi social dalam masyarakat (Anggara, 2016). Beberapa karakteristik yang harus

diadopsi dan dikembangkan dalam praktik *good governance* yaitu partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik atau nasional, respon pemerintah terhadap semua kepentingan publik., transparansi setiap kerangka alur sistem informatika antara pemerintah dan publik, dan keadilan dan non diskriminasi. Dalam rangka kebiasaan kesetaraan kebiasaan kesetaraan publik, efektivitas publik untuk menjaga ligitimasi pemerintah di mata publik, kesetaraan publik, pluralism, dan terakhir kebebasan publik (Hanapiah, 2007). *Good governance* tujuannya adalah mampu menciptakan kondisi pemerintahan untuk melindungi kepentingan pelayanan publik secara seimbang dan adil melalui kerjasama dengan semua pihak atau pemangku kepentingan (Heriyanto, 2015).

Untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, perlu adanya pemerintahan yang bersih atau bisa disebut dengan *clean goverment*. Yang dimaksud dengan *clean goverment* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dimana penyelenggaraan menejemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien. Pemerintah yang bersih biasanya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintah yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintah yang baik atau *good goverment*. Dalam penyelenggaraan urusan terhadap tiga faktor penting pertama adalah pemerintah, fungsinya adalah merumuskan kebijakan public, mengendalikan dan mengawasi publik, melindungi dan melayani sektor publik dan swasta, serta memajukan kepentingan publik, melayani negara dan masyarakat, dan melayani kepentingan umum. Kedua adalah masyarakat, fungsi statusnya dapat menjadi subjek dan objek atau peserta dalam pengelolaan pemerintah dan swasta untuk mengontrol kinerja pemerintah. Terakhir swasta, sektor swasta bertanggung jawab untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, menyelenggarakan pekerjaan kesejahteraan nasional, menyelenggarakan perusahaan industri dan perdagangan, dan menyelenggarakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

### 2. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang atau berkelompok yang mempunyai kedudukan di masyarakat contohnya seperti pemerintah. Menurut Blakely, dalam Mudrajad Kuncoro (2004) menyatakan bahwa peran pemerintah memiliki tiga cakupan, yaitu yang pertama adalah koordinator, disini dimaksudkan bahwa pemerintah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan sebuah kebijakan atau strategi untuk pembangunan di daerahnya. Kedua yaitu fasilitator, dimana pemerintah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Dan yang terakhir yaitu stimulator, disini pemerintah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar tetap berada di daerah tersebut (Arifin, 2017).

Spillane (1991: 133) meyakini bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan sebuah produk wisata adalah dengan menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara pejabat pemerintah dan swasta, regulasi dan promosi secara keseluruhan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Sebagai penggerak dalam sebuah produk wisata,

masyarakat juga aset yang juga dimiliki oleh industri wisata. Sementara Suwantoro (2014: 85) meyakini bahwa peran masyarakat dapat dimainkan secara aktif maupun pasif. Melalui partisipasi langsung dalam kegiatan, baik secara langsung maupun individu atau bersama-sama untuk secara aktif memainkan peran tersebut. Sedangkan partisipasi pasif merupakan pembangkitan kesadaran masyarakat bahwa mereka tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar objek wisata. Partisipasi masyarakat dapat berupa layanan akomodasi. Menyediakan atau mengoperasikan warung makanan dan minuman, menyediakan toko souvenir atau cenderamata, jasa pemandu wisata, fotografi dan karyawan untuk perusahaan swasta (Ridwan et al., 2017).

Dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan di daerah, peran pemerintah sangat ditentukan oleh fungsi yang melekat, sifatnya memberikan keuntungan kedua belah pihak atau *positive sum game* (swasta dan masyarakat). Sedangkan peran dari swasta adalah menyediakan beberapa fasilitas atau akomodasi dan jasa yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Peran masyarakat yaitu masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas di daerahnya (Aksan, 2019).

Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat memang harus berjalan dengan bersamaan. Karena dapat dilihat dari peran masing-masing seperti pemerintah berperan sebagai coordinator, fasilitator, dan stimulator. Swasta berperan sebagai penyedia fasilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Dan masyarakat sendiri berperan sebagai pelaku pelaksana dalam produk wisata, seperti menyediakan warung-warung makan, oleh-oleh khas, dll.

### 3 Strategi

Strategi adalah sebagai cara mencapai sebuah tujuan menyusun suatu rencana (plan) jangka panjang dalam mencapai sebuah tujuan tersebut (Karlina, 2019). Menurut James Brian Quinn, strategi adalah sebuah rencana untuk melakukan integrasi antara tujuan, kebijakan, dan aksi atau tujuan (Brooklyn, 2019). Dalam buku *Strategi Process* (2003) yang dikemukakan oleh Mintzberg, Lampel, Quinn, Ghoshal, strategi yang efektif mengandung tiga elemen penting. Pertama yaitu tujuan, yang dimaksud disini adalah hasil yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga. Dimana tujuan tersebut adalah sebuah elemen penting untuk mengetahui strategi apa yang akan dilakukan sebuah lembaga tersebut. Kedua yaitu kebijakan, dimana sebuah lembaga membuat serangkaian keputusan untuk memandu dan membatasi tindakan yang diambil. Pengambilan kebijakan ini untuk menentukan arah penetapan tujuan, sehingga perumusan kebijakan lebih mudah menjadi pedoman lembaga untuk melaksanakan strategi. Yang terakhir yaitu program, dimana serangkaian tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan sebuah lembaga. Dengan memadukan kedua elemen sebelumnya agar strategi yang diterapkan akan terlaksana dengan maksimal (Asriandy, 2016). Strategi dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai informasi, menetapkan tujuan, menentukan kebijakan, mengalokasikan sumber dana, rencana operasi, dan mengalokasikan manfaat. Pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan distribusi hasil, masyarakat harus turut dilibatkan.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah strategi akan berjalan secara maksimal apabila ketiga elemen tersebut diterapkan dengan

benar dan sesuai. Dalam hal ini peneliti bisa menceritakan tujuan apa yang telah dibuat oleh Pemerintah dan masyarakat dengan adanya sebuah tempat wisata yang telah dibangun. Setelah itu kebijakan apa saja yang akan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Terakhir bagaimana program dan rencana-rencana yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat Desa agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan untuk mengembangkan produk wisata yang telah dibangun.

### 4 Partisipasi Masyarakat

Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah proses partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan menentukan alternatif pemecahan masalah, melaksanakan upaya pemecahan masalah, dan partisipasi masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan. Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi sebagai enam pengertian, yaitu (a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat terhadap proyek dan tidak berpartisipasi dalam daya tanggapannya terhadap proyek pembangunan pengambilan keputusan. (b) Partisipasi adalah pemekaan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan; (c) Partisipasi adalah suatu proses positif, yang berarti bahwa individu atau kelompok yang relevan mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan mereka untuk melakukannya; (d) Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat lokal dan staf yang terlibat dalam Persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan untuk memperoleh informasi tentang lingkungan setempat dan dampak social; (e) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan keputusannya sendiri; (f) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan diri, kehidupan dan lingkungan (Rukminto Adi, 2007).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah perilaku keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dan perkembangan desanya secara aktif melalui musyawarah sehingga sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan.

### 5. Wisata Kampung Adat

Wisata Kampung Adat merupakan wisata yang menonjolkan kawasan pedesaan yang memiliki ciri khas arsitektur dan tata ruang pedesaan serta keindahan yang masih asri dan hasil alamnya, yang dimana suasana kegiatan ekonomi dan lainnya yang dapat mengembangkan berbagai komponen pariwisata seperti tempat berfoto, makanan khas, oleh-oleh, home stay, dll. Kampung Adat disini adalah wisata yang berada di Dusun Segunung, yang merupakan produk wisata hasil dari pendampingan pemerintah dalam program pengembangan potensi desa. Disana produk wisata berbasis masyarakat yang mengangkat konsep tradisional dan khas pedesaan seperti menunjukkan penampilan permainan tradisional, pakaian khas masyarakat, gotong royong, tindak-tanduk, keramah-tamahan masyarakat, dan proses memasak khas pedesaannya.

#### 2.3.2 Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Dusun Segunung dalam upaya pengembangan Wisata Kampung Adat Segunung dapat dikenali dalam tiga tahapan yakni pertama dengan mencari tahu apa sebenarnya tujuan dari dibuatnya sebuah wisata berbasis masyarakat tersebut. Kedua

dengan pemerintah yang membuat suatu kebijakan-kebijakan untuk mengatur dan memberi arahan yang sesuai dengan tujuan dibuatnya sebuah wisata desa. Ketiga pemerintah beserta masyarakat membuats suatu program dan rancangan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Disini Pemerintah Desa Carangwulung juga menerima pengadaan pembimbingan dan pelatihan untuk masyarakat baik dari Pemerintah Kabupaten ataupun dari akademisi. Harapannya agar masyarakat bisa lebih aktif dan kreatif untuk mengelola potensi yang ada di dusunnya dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada di Kampung Adat Segunung.

## 2.4 Kerangka Berfikir

Organisasi merupakan tempat dimana ada dua orang atau lebih yang berkumpul dan bekerjasama guna mencapai tujuan yang sama. Sumbangan pikiran, tenaga, waktu, dan apapun yang dapat dimasukkan dalam kinerja masing-masing anggota terhadap kesuksesan organisasi dalam meraih capaian tentu sangat diharapkan. Berbagai komponen spesifikasi anggota tersebut merupakan alat gerak yang pengelolaan potensi geraknya dilakukan oleh menejemen dalam sebuah organisasi. Manajemenlah yang kemudian mengatur lingkup kewenangan termasuk hak dan kewajiban hingga arah kemudi mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh sebuah organisasi. Salah satu manajemen yang berfungsi mengatur batasan kewenangan dapat dilihat pada peraturan yang sering dikenal dengan istilah Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) atau yang dapat juga disebut fungsi tugas pokok (SITUPOK).

Sebagai sebuah organisasi, pemerintahan desa pasti memiliki SITUPOK atau fungsi tugas pokok pada setiap strukturalnya. Seperti SITUPOK pada kepala desa, yang dimana fungsinya adalah membina ekonomi desa, mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasi, dan lain-lainnya. Dalam menjalankan sebuah peran pada suatu pemerintah, diperlukan sebuah kepemimpinan yang baik (*good governance*), dimana juga memerlukan pemerintah yang bersih (*clean government*). Pemerintah yang bersih ini juga disebut sebagai pemerintah yang baik (*good government*). Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan 7 prinsip-prinsip yaitu Profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, dan supermasi hukum. Jika prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan maka akan tercipta sebuah strategi-strategi dalam pemerintahan. Misalnya seperti startegi pengembangan yang memiliki beberapa kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah kebijakan pengembangan BUMDES. Dari pengembangan BUMDES, peneliti menganalisis model-model perintisan seperti apa yang akan dilakukan BUMDES dan masyarakat Dusun Segunung seinggga dapat mengetahui peletakan alokasi dan lokasi yang tepat. Setelah ketiga komponen tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT, peneliti akan mengetahui bagaimana pengembangan model Wisata Kampung Adat Segunung yang dilakukan oleh BUMDES.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan untuk meneliti sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran atau kejadian terkini (Moloeng, 2002). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan pada penelitian yang dilakukan dengan setting alamiah, peran peneliti sebagai pengumpul data, menggunakan analisis induktif, dan memiliki fokus pada makna menurut prespektif partisipan (Suprpto, 2019). Jadi pendekatan deskriptif kualitatif adalah menggambarkan keadaan suatu fenomena dalam sebuah kata atau kalimat, kemudian memisahkannya menurut kategorinya untuk menarik suatu kesimpulan. Sedangkan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah proses pemecahan masalah, penyelidikan dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan objek kelompok (orang, Lembaga, masyarakat, dll) (Soekanto, 1999).

Dasar penelitian yang dilakukan peneliti dalam pendekatan deskriptif ini adalah kesimpulan dari hasil jawaban informan mengenai rumusan masalah penelitian. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana startegi Pemerintah Desa Carangwulung dalam pengembangan wisata Kampung Adat Segunung serta bagaimana partisipasi masyarakat sekitar dalam mengembangkan Kampung Adat Segunung.

### 3.2 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti memposisikan diri sebagai observer partisipan yang berarti peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk meninjau aktivitas individu di lokasi tempat yang akan diteliti (Creswell, 2016). Peneliti disana akan mewawancarai beberapa informan kunci dan informan tambahan dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya oleh peneliti.

Pada mulanya peneliti mengamati lokasi wisata Kampung Adat Segunug dan melihat perkembangan dan perbedaan lokasi pada waktu sekarang dan pada tiga tahun lalu. Setelah itu peneliti menuju ke Kantor Desa Carangwulung dan kemudian kembali lagi ke Kampung Adat Segunung untuk mendapatkan beberapa keterangan dan informasi dari informan-informan yang sesuai dengan keperluan peneliti.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data sebagai bahan menjawab suatu permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan di lokasi sesuai dengan judul penelitian yaitu di kantor Pemerintahan Desa Carangwulung dan Masyarakat Dusun Segunung Desa Carangwulung yang merupakan tempat wisata Kampung Adat Segunung. Di lokasi tersebut peneliti melakukan penelitian dan pengamatan secara mendalam tentang bagaimana strategi pemerintah desa dan kontribusi masyarakat untuk perkembangannya wisata Kampung Adat Segunung yang merupakan sebuah tempat wisata baru yang masih perlu dikembangkan.

### 3.4 Sumber Data

#### 3.4.1 Data

Disini data sangat penting dalam sebuah penelitian, data terbagi mejadi 2 jenis yaitu data primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Peneliti mendapatkan data-data tersebut dari datang langsung ke Pemerintahan Desa Carangwulung dan tokoh masyarakat Dusun Segunung atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Adat Segunung. Data tersebut bisa berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai dengan fokus peneliti.

#### 3.4.2 Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana sampel yang dipilih peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum menentukan informan dan pertanyaan-pertanyaan saat melakukan wawancara dan mencari data (Arikunto, 2010). Seperti pada penelitian ini, peneliti membuat daftar wawancara kemudian menentukan siapa saja informan yang akan diwawancarai untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah Desa Carangwulung serta apa saja partisipasi masyarakat Dusun Segunung dalam mengembangkan wisata Kampung Adat Segunung saat ini.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung ke lokasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui arsip dan dokumen desa.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan tiga acara, yaitu pertama adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung atau obesrvasi. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung selama beberapa kali ke lokasi penelitian sebelum melakukan wawancara ke Pemerintah Desa Carngwulung dan tokoh masyarakat. Dengan begitu peneliti bisa lebih tahu secara mendalam tentang Kampung Adat Segunung dan sebagai penunjang pertanyaan. Sesuai dalam buku karya sugiyono, observasi merupakan proses yang terdiri dari berbagai proses, dua yang terpenting diantaranya adalah proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017). Untuk memenuhi data yang diperlukan, peneliti terjun langsung melakukan pengamatan ke Kampung Adat Segunung pada tanggal 5 Juni 2021 pukul 13.25 WIB. Pada awal observasi ini peneliti datang hanya untuk melihat dan mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dari Universitas Bayangkara Surabaya. Kegiatan tersebut berupa talksow untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema “Restorasi Ekosistem Untuk Masa Depan Yang Berkelanjutan” bersama kelompok tani Dusun Segunung, Kelompok Pengelola Hutan Rakyat Sumber Sejahterah Jombang, Perhutani KPH Jombang, dan Dinas Lingkungan Hidup Jombang. Selain itu juga ada bazar gelar potensi Kampung Adat Segunung. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 5-6 Juni 2021. Disana peneliti mengetahui antusias masyarakat baik dari kalangan anak-anak, muda-mudi, hingga orang tua.

Setelah melakukan pengamatan secara langsung, selanjutnya peneliti melakukan penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling* untuk melakukan cara pengumpul

data kedua yaitu wawancara. Dalam tahap wawancara ini peneliti menggunakan teknik yang dilakukan dengan cara penyelidikan langsung sehingga peneliti dapat memperoleh informasi terkait dengan objek yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan menyusun pedoman wawancara agar proses wawancara terarah dan teratur. Dalam hal ini peneliti melakukan sebuah wawancara dengan menggunakan dua metode yakni metode formal dan nonformal sesuai dengan metode wawancara yang ada pada penelitian thesis Suprpto (Suprpto, 2019) untuk melakukan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa Carangwulung, tokoh masyarakat Kampung Adat Segunung dan informan tambahan lainnya. Tanggal 15 Juli 2021 peneliti datang kembali ke lokasi penelitian tetapi sebelumnya ke Kantor Desa Carangwulung terlebih dahulu untuk meminta izin penelitian sekaligus wawancara secara formal kepada kepala desa, staff perencanaan, sekertaris desa, dan kepala dusun. Namun pada saat itu peneliti tidak bisa bertemu dengan kepala dusun karena beliau masih ada kegiatan diluar kantor. Saat peneliti mewawancarai sekertaris desa, durasi wawancaranya sangat sedikit karena beliau harus pergi rapat. Oleh sekertaris desa peneliti diarahkan langsung ke staff perencanaan dan berpesan untuk tanya apa saja dan butuh apa saja langsung ke salah satu staff perencanaan tersebut. Setelah dari kantor desa, peneliti datang ke Kampung Adat Segunung untuk melakukan wawancara secara formal dan nonformal kepada beberapa tokoh masyarakat Dusun Segunung dan masyarakat Dusun Segunung. Wawancara secara nonformal dilakukan peneliti kepada informan yang sudah cukup kenal dekat dengan peneliti. Ada beberapa tokoh masyarakat yang sudah diwawancarai peneliti tapi karena peneliti masih merasa kurang, akhirnya peneliti mencari informasi tambahan melalui video youtube Dedurian Park TV. Karena waktu tidak cukup, peneliti memutuskan untuk melanjutkan wawancara di tanggal 22 Juli 2021 untuk mewawancarai informan tambahan yakni informan di enam dusun yang berada di Desa Carangwulung.

Selain melalui pengamatan dan wawancara, cara ketiga yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi didapatkan peneliti melalui laporan lapangan dalam rangka menganalisis masalah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Menurut Suprpto dalam thesis penelitian yang membahas tentang teknik pengumpulan data (Suprpto, 2019), dalam dokumen terdapat dua jenis yaitu pertama adalah gambar atau foto digunakan sebagai bukti dalam proses penelitian sebagai ilustrasi deskripsi yang mendeskripsikan gambar tersebut harus ada. Kedua adalah file atau dokumen yang akan diperoleh harus mengikuti aturan prosedur struktural. Dalam hal ini peneliti memilih gambar atau foto sebagai data tambahan, dengan mendatangi beberapa informan untuk mengumpulkan data dengan dokumentasi. Peneliti mengambil dokumentasi kegiatan serta foto Kampung Adat Segunung sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

### 3.6 TEKNIK ANALISIS DATA

Demi menghindari peneliti dari ketepihakan, kebocoran hasil, menjaga privasi, dan menyembunyikan identitas informan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Creswell, maka peneliti telah

melakukan teknik analisis data yang ada di lapangan. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data catatan peneliti (Creswell, 2016). Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil data yang telah didapatkan masuk kedalam analisis data tahap pertama, yaitu mengolah dan mempersiapkan suatu data untuk dianalisis dengan cara memilah dan memilih serta menyusun data yang sudah diperoleh dengan jenis yang berbeda sesuai sumber informasi. Untuk data primer, peneliti mendapatkan melalui wawancara dari pihak desa yaitu kepala desa, staff perencanaan. Sedangkan dari Kampung Adat Segunung peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara langsung dengan tokoh masyarakat serta diambil dari beberapa video youtube akun Dedurian Park TV, yang dimana video tersebut merupakan penjelasan kenapa Kampung Adat Segunung dibuat, bagaimana bentuk dan desain dari Kampung Adat Segunung, dan lain-lain oleh kepala dusun dan juga tokoh masyarakat. Selain itu peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Desa Carangwulung secara random tetapi tetap memilih informan dan pertanyaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan-informan tersebut merupakan masyarakat dari beberapa dusun yaitu Dusun Segunung, Dusun Banyon, Dusun Gondang, Dusun Carangwulung, Dusun Bangunrejo, Dusun Ngeseng. Peneliti mengambil dua orang informan dari setiap dusun untuk menunjang data peneliti. Untuk data sekunder, peneliti mendapatkan dari Instagram Kampung Adat Segunung (@kampungadatsegunung) dan memotret secara langsung Kawasan Kampung Adat Segunung.

Tahap kedua, peneliti mulai membaca kembali data yang telah dipilih secara keseluruhan dan mencermati perkataan informan dan mencermati makna keseluruhan dari informan yang telah didapat selama berada dilapangan. Disini peneliti mendengarkan kembali rekaman suara wawancara bersama informan, setelah itu peneliti menulis ulang setiap kata dari informan pada kertas kosong dan mencermati kembali setiap jawaban dan dicocokkan dengan keperluan peneliti. Jika dirasa kurang, peneliti akan datang kembali ke lokasi penelitian.

Tahap ketiga, peneliti memberikan kode kesemua data diawali dengan pengelompokan data yang sejenis dan memberikan istilah khusus untuk mendeskripsikan informasi tentang orang, lokasi, dan peristiwa. Saat pemberian kode bisa dengan memberikan codebook, didalamnya menjelaskan tentang data kode yang akan digunakan serta ada definisi setiap kode supaya nantinya lebih memudahkan mendapatkan hasil dari data yang telah dianalisis.

Pada penelitian ini peneliti memberikan kode hasil wawancara yang sudah dilakukan dalam proses pengumpulan data, sebelumnya peneliti mengelompokkan terlebih dahulu data-data yang sejenis sehingga lebih mudah untuk dikelola dan diberi kode. Penggunaan kode ini berfungsi untuk memudahkan data yang akan dianalisis sehingga hasil wawancara lebih mudah dipahami. Kode yang digunakan peneliti antara lain:

**Tabel 3.2 Kode Hasil Wawancara**

Kode	Untuk mendefinisikan
W	Wawancara
VY	Video Youtube
KDs	Kepala Desa
KDsn	Kepala Dusun
SP	Staff Perencanaan
SD	Sekretaris Desa
TM	Tokoh Masyarakat
Ms	Masyarakat

Sumber: data Peneliti 2021

Setelah melakukan pengkodean, dilanjutkan dengan menuliskan tanggal dan jam saat melakukan penelitian. Contohnya seperti wawancara dengan kepala desa pada tanggal 15 Juli 2021 pukul 10.35 WIB. Sehingga penulisannya adalah (W/KDs/15 Juli 2021/10.35 WIB), begitupun yang lainnya sesuai dengan kode yang telah ditentukan.

Tahap keempat, setelah proses pemberian kode selanjutnya membedakan tema dan deskripsinya yang bisa digunakan oleh peneliti lebih jauh untuk menganalisis tema yang sudah ada agar lebih kompleks. Tahap ini peneliti membedakan jawaban informan sesuai dengan tema yang akan dibedakan sesuai sub bab dan mendeskripsikannya sesuai dengan informasi dan data yang sudah diberi kode tersebut.

Tahap kelima, saling menghubungkan antara tema dengan deskripsi kemudian dijadikan sebagai laporan kualitatif dalam bentuk narasi. Sehingga pada tahap terakhir peneliti bisa menjabarkan dan menyatukan makna antara temuan peneliti dengan informasi yang berasal dari teori. Tahap ini peneliti mendeskripsikan informasi dan data baik sata primer maupun sekunder dan menyatukannya sesuai dengan teori yang sudah ada.

### 3.7 Keabsahan Data

Pada tahap ini, yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Menurut Creswell dalam penerapan keabsahan data, ada 8 pokok diantaranya yaitu (1) Triangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber, (2) menggunakan *member checking* untuk mengetahui hasil penelitian yang akurat, (3) mendeskripsikan hasil penelitian dengan ranah (*setting*) agar menambah validasi hasil penelitian, (4) mengklarifikasi bias yang dibawa oleh peneliti ke dalam penelitian, (5) menyajikan informasi yang berbeda yang dapat memberikan perlawanan pada tema tertentu dengan menyajikan bukti yang kontradiktif dan hasil penelitian terlihat real dan valid, (6) menggunakan waktu yang cukup panjang di lapangan, (7) melakukan tanya jawab untuk mengakuratkan data, (8) meminta bantuan auditor untuk meninjau keseluruhan hasil penelitian (Creswell, 2016).

Peneliti menggunakan dua dari delapan strategi pengecekan keabsahan data tersebut, yaitu triangulasi (*triangulate*) dan menggunakan waktu yang Panjang di lapangan. Untuk mendapatkan kebenaran informasi dan gambaran utuh, peneliti menggabungkan metode wawancara dan observasi untuk

mengetahui kebenarannya. Selain kedua metode tersebut, peneliti juga mewawancarai informan lain dengan pertanyaan yang sama untuk mengetahui kebenaran perbandingan dari jawaban seluruh informan. Seperti pertanyaan yang sama untuk kepala desa, sekretaris desa, staff perencanaan. Ada juga pertanyaan yang sama untuk tokoh-tokoh masyarakat, dan persamaan pertanyaan untuk mencari data pada masyarakat keenam dusun di Desa Carangwulung. Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan untuk mendapatkan hasil yang benar dan diharapkan peneliti, dengan kembali ke lokasi penelitian setelah informasi dan data telah didapatkan

#### 4. PEMBAHASAN

Inovasi Desa (PID) untuk memberi dorongan dan fasilitas pada desa-desa dalam merencanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi desa. Salah satu kegiatan dalam PID adalah Bursa Inovasi Desa (BID) yang memfasilitasi pertukaran ide dari desa-desa terkait pembangunan yang didanai oleh dana desa. Pada 30 Oktober 2018, Bupati dan Wakil Bupati Jombang membuka BID dengan fokus pada pengembangan produk unggulan desa, embung desa, sarana olahraga, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Carangwulung memanfaatkan PID dan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengembangkan Kampung Adat Segunung sebagai produk unggulan desa. Kampung Adat Segunung, yang didirikan pada tahun 2019, berada di Dusun Segunung dengan tujuan menghidupkan kembali budaya lama dan memanfaatkan potensi alam desa. Desa Carangwulung memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sebagai penghasil durian terbesar di Jawa Timur.

Kampung Adat Segunung menjadi ikon desa Carangwulung, menarik minat wisatawan dengan potensi alamnya yang asri dan produk unggulannya. Desa ini ingin mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui pembinaan dan pendampingan, desa mengembangkan beberapa produk unggulan seperti permen susu, tanaman hias, dan batik khas.

Pemerintah Desa Carangwulung menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengembangan Kampung Adat Segunung, termasuk profesionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Mereka juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dengan membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan melibatkan masyarakat dalam pelatihan dan pembinaan.

Kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, swasta, dan akademisi menjadi kunci dalam pengembangan Kampung Adat Segunung. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator dalam pengembangan pariwisata. Melalui pendampingan dan program pembinaan, diharapkan Kampung Adat Segunung dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Pemerintah Desa dan Kontribusi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Segunung adalah sebagai berikut.

1. Strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Carangwulung untuk pengembangan wisata Kampung Adat Segunung adalah dengan menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa atau

BUMDes dan memusatkan semua kegiatan seperti UMKM, wisata desa, dan kegiatan usaha milik desa dengan dikelola oleh BUMDes. Selain itu juga membuat kelompok sadar wisata atau POKDARWIS untuk menjadi penjemputan kegiatan atau program pemerintah untuk Kampung Adat Segunung.

2. Partisipasi masyarakat Dusun Segunung untuk pembuatan dan pengembangan wisata Kampung Adat Segunung adalah dengan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan dan program yang ada di Kampung Adat Segunung serta dari Pemerintah Desa Carangwulung untuk pengembangan Kampung Adat Segunung. Apalagi seperti yang telah dijelaskan bahwa wisata Kampung Adat Segunung adalah wisata yang menonjolkan kegiatan sehari-hari masyarakat dan sumber daya yang memang sudah ada di masyarakat Dusun Segunung. Masyarakat yakin dengan adanya Kampung Adat Segunung akan berdampak pada perekonomian masyarakat kedepannya.

Pemerintah desa beserta masyarakat masih perlu mengembangkan lagi potensi yang di Dusun Segunung untuk pembuatan atraksi di Kampung Adat Segunung. Seperti peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan pariwisata lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu pemerintah desa juga seharusnya turut ikut serta dalam promosi wisata Kampung Adat Segunung dengan membuat sebuah halaman khusus di website tentang Kampung Adat Segunung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, M. (2019). *Tata Kelola Pariwisata Pantai Batumianak Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara*.
- Arifin, Z. (2017). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Naskah* (Vol. 6, Issue 1) [Universitas Maritim Raja Ali Haji]. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Arimayanti, N. K. (2017). Pariwisata Hijau Sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata Di Indonesia. In *Tren Pariwisata Milenium* (pp. 28–29). Pustaka Larasan.
- Asriandy, I. (2016). *Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air*.
- Brooklyn, T. (2019). *Pengertian strategi*. <https://taldebrooklyn.com/pengertian-strategi/>
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Empat). Pustaka Pelajar.
- Hanapiah, P. (2007). *Good Governance: Membangun Masyarakat yang Demokratis dan Nasionalis*.
- Harahap, H. (2017). *Pengaruh Model/Bentuk Bangunan dan Lokasi Dalam Pembelian Perumahan Sibulan Business Center Di Tapunali Tengah*.
- Harobu, D. (2020). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta [Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”]. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. [JIPMP@2023](https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-</a></p></div><div data-bbox=)

- 210\_Unit\_Materials/PSY-210\_Unit01\_Materials/Frost\_Blog\_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://
- Heriyanto, A. (2015). *Peerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. 151, 10–17.
- UU Nomor 6 Tentang desa, 45 (2014) (testimony of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Karlina, A. (2019). *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya*.
- Moelyono, M. (2010). *Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan Dan Kebutuhan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (keempat)*. Balai Pustaka.
- Permana, R., & Asrida, D. W. (2011). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2008-2011*. 24. [http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz\\_Zapata\\_Adriana\\_Patricia\\_Articulo\\_2011.pdf](http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf)
- Pranjoto, R. G. H. (2015). *Strategi Bisnis Ditengah Persaingan Ketat*. 11–19.
- Rakhmawati, Y. (2018). No Title. *Mediapetisi.Net*. <https://mediapetisi.net/2018/10/30/bupati-jombang-bursa-inovasi-desa-guna-meningkatkan-ekonomi-masyarakat-desa/>
- Ridlwani, M. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2017). Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9933>
- Rukminto Adi, I. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan (Pertama)*. FISIP-UI Press.
- Soekanto, S. (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Prees.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Suprpto. (2019). *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Dalam Penolakan Pabrik Karet Di Desa Medali* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53053>
- Tomuka, S. (2012). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.